

Anies Jadi Capres Nasdem, Wagub Riza: Biasa Saja, Hubungan Tetap Baik

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan tetap menjaga hubungan baik dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan meski orang nomor satu di DKI itu dideklarasikan sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.

"Jadi biasa saja, hubungan (tetap) baik. Tidak ada masalah," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/10).

Menurut dia, merupakan hak partai politik untuk mengusung calon presiden yang maju pada Pilpres 2024. Sebagai kader partai Gerindra yang saat ini menjadi ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Riza akan memperjuangkan untuk mengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meski berbeda partai, keduanya masih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI. Riza menyatakan ia dan Anies akan tetap menyelesaikan tugas dan menjalankan program kerja hingga pensiun pada 16 Oktober 2022.

"Beliau sebagai gubernur, saya sebagai wakil gu-

bernur, melaksanakan tugas sesuai dengan RPJMD yang ada," ucap Riza.

Ia pun tidak permasalahan ketika partai NasDem mendeklarasikan Anies meski saat ini masih aktif sebagai Gubernur DKI atau pejabat negara. "Itu kan hak partai, mau kapan saja mendeklarasikan calon itu hak partai, semua partai politik punya hak untuk mendeklarasikan. Partai kami kan juga sudah duluan di Rapimnas kemarin," ungkap Riza.

Riza pun yakin, Anies tidak mencampuradukkan kepentingan Pilpres dengan sisa tugas di DKI Jakarta. "Saya kira pak gubernur, Pak Anies memahami, selama ini kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik, urusan pencapresan. Pak Anies sudah mengertilah," tutur pria biasa disapa Ariza itu.

Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria akan mengakhiri masa tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 16 Oktober 2022.

Selama masa kekosongan jabatan hingga 2024, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan penjabat gubernur DKI yang akan menjalankan roda pemerintahan sementara. ● yan

4 | Metropolis

FOTO:ANT



AKSI MENOLAK PEMECATAN HAKIM KONSTITUSI

Sejumlah pegiat yang tergabung dalam elemen masyarakat madani menggelar aksi unjuk rasa menolak pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/10). Dalam aksinya mereka menolak pemecatan tersebut karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku serta meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menindaklanjuti permintaan dari DPR.

Antrean Mengular, Anggota DPRD DKI Kritik TransJakarta Ubah Sistem Kartu

Penumpang mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari pihak TransJakarta, salah satunya terkait kartu yang harus direset ulang ketika mengalami gangguan. Kartu-kartu lama banyak yang harus direset ulang kayak kita naik MRT, LRT supaya bisa berfungsi di sistemnya. Nah ini nggak ada sosialisasi itu tiba-tiba pagi ini semuanya jadi harus antre untuk tap, kata mereka.

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik perubahan sistem kartu yang dilakukan TransJakarta hingga menyebabkan antrean panjang di halte. Gilbert menilai seharusnya perubahan

sistem baru dilakukan jika sudah matang. "Perubahan ini seharusnya dilakukan serentak bila sudah yakin tidak ada kendala. Ini jelas mengorbankan masyarakat," kata Gilbert kepada wartawan, Selasa (4/10).

Gilbert mengatakan dia banyak menerima keluhan dari warga sejak pagi tadi. Dia mengatakan antrean mengular di halte bus TransJakarta menyebabkan warga terlambat masuk kerja.

"Ada yang kirim WA, nge-tweet dan Instagram. Mereka kesal atau dongkol karena bikin telat dan lelet," ujarnya.

Gilbert mempertanyakan kajian serta kesiapan JakLingko maupun TransJakarta dalam melakukan perubahan sistem. Semestinya, menurut dia, langkah ini dilakukan ketika JakLingko, TransJakarta, maupun Dishub bisa memastikan tak akan ada kendala yang terjadi.

"Sekarang terbukti ketidak-siapan Dishub sebagai regulator utama, dan TransJakarta,

JakLingko terlibat sebagai pengelola dan BUMD lain yang terlibat," ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI itu juga menerima informasi perubahan sistem ini mendukung penerapan tarif integrasi transportasi. Dia mengatakan kejadian hari ini akan menjadi bahan evaluasi.

"Ini akan jadi evaluasi keberhasilan tarif integrasi yang mereka tawarkan dan kita beri waktu 6 bulan," jelasnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS, Suhud Alyudin memahami tujuan perubahan sistem dilakukan dalam rangka peningkatan layanan. Kendati begitu, dia tetap meminta ke depannya TransJakarta dapat menyosialisasikan setiap perubahan kepada masyarakat demi menghindari kejadian tak diinginkan.

"Pemberlakuan sistem baru memang perlu sosialisasi yang massif dan kesiapan petugas layanan dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, seperti adanya antrean panjang," kata Suhud.

Dia juga meminta petugas bus TransJakarta dapat dibekali dengan pembelajaran menghadapi situasi gaduh.

"Petugas layanan ataupun sistem harus dipastikan bisa mengantisipasi antrean. Agar penumpang bisa keluar halte TJ dengan cepat, untuk menghindari terjadi kerumunan yang berpotensi memunculkan kegaduhan," ujarnya.

Penumpukan Penumpang

Sejumlah halte TransJakarta sempat mengalami penumpukan penumpang pagi ini. Hal ini dikarenakan mulai diberlakukan sistem satu kartu satu penumpang yang mewajibkan wajib *tap in* dan *tap out*.

Salah satu penumpang Ancella (35), mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari pihak TransJakarta. Salah satunya terkait kartu yang harus direset ulang ketika mengalami gangguan.

"Iya tadi kartu-kartu lama banyak yang harus seperti kayak direset ulang kayak kita naik MRT, LRT gitu kartu lama kan harus ditap dulu tuh supaya bisa berfungsi di sistemnya. Nah ini nggak ada sosialisasi itu tiba-tiba pagi ini semuanya jadi harus antre untuk tap itu," ujar Ancella ketika ditemui di kawasan Halte TransJakarta S Parman, Jakarta Barat, Selasa (4/10).

Dia mengatakan pihak TransJakarta tidak memberikan sosialisasi terkait reset kartu tersebut. Sehingga menurutnya akan merepotkan calon penumpang yang hendak berangkat ke kantor.

"Iya nggak ada (sosialisasi). Maksud saya gini kan kita orang kerja ya pagi-pagi udah butuh cepet sekarang jalanan juga jauh lebih macet karena WFO nah itu makan waktu banyak untuk antre. Pun pintu halatnya tuh kecil banget," ucapnya. ● yan

Raperda Depok Kota Religius Ditolak Kemendagri

DEPOK (IM) - Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Kota Religius ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disahkan menjadi Perda. Selain ditolak Kemendagri, Idris menyebut raperda itu juga tidak didukung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Merespons hal tersebut, Ridwan Kamil meyakini pastinya ada dinamika yang membuat Raperda Kota Religius Depok ditolak Kemendagri. Namun, pria yang akrab disapa Kang Emil itu tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan ditolaknya raperda itu oleh kementerian.

"Di mana-mana, perda religius itu pasti biasanya ada dinamika di Kemendagri. Jadi

kita tunggu saja," kata Kang Emil saat ditemui wartawan di kampus UPI Bandung, Selasa (4/10).

Kang Emil mengatakan kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak sebuah perda berada di Kemendagri. Sehingga, kata dia, segala keputusan apapun ujung-ujungnya merupakan kewenangan dari Kemendagri.

"Biasanya ditolak di Kemendagri karena ujung yang meng-*approved*-nya Kemendagri. Gitu aja, kita lihat saja," ucapnya.

Seperti diketahui, Kemendagri tak mengesahkan Raperda Kota Depok tentang Kota Religius. Wali Kota Depok, Mohammad Idris kecewa dan berharap Raperda itu bisa lolos untuk disahkan menjadi Perda. ● yan



FOTO:ANT

INSPEKSI KEPATUHAN PENDUDUK

Sejumlah petugas gabungan lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tingkat Kecamatan Cempaka Putih melakukan inspeksi kepatuhan penduduk terhadap administrasi kependudukan dan perizinan bangunan indekos di kawasan RW 02, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10).

Anies Siapkan Pembangunan Fasilitas Bagi Warga Pesisir

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, sudah menyiapkan program pembangunan fasilitas bagi masyarakat pesisir dan kepulauan di DKI Jakarta. Pembangunan fasilitas itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Kami di antaranya sudah bangun Jak Grosir yang bertujuan untuk memudahkan warga kepulauan bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang setara dengan warga di kawasan daratan," kata Anies menjawab pertanyaan wartawan dalam video persमीn revitalisasi Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (4/10).

Ikut hadir dalam peresmian revitalisasi Pelabuhan Muara Angke adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, dan Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi.

Berikutnya, ujar Anies, pengadaan air bersih, yang tujuannya supaya warga memiliki akses pada air yang bersih dengan harga terjangkau, kemudian pengolahan limbah.

Sehingga, setiap pulau-pulau menjadi bersih dan nyaman, kemudian pembangkit listrik dikerjakan berdasarkan solar atau tenaga matahari, lalu pembangunan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang seluruhnya merupakan bagian dari membuat Kepulauan Seribu bisa merasakan kemajuan sebagaimana di daratan.

Terkait program sekolah rendah emisi (*net zero carbon*), Anies berharap, warga Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu bisa bersabar untuk menunggu pelaksanaannya.

Saat ini, sekolah dengan

konsep bangunan emisi rendah emisi itu baru ada di SDN Duren Sawit 14, Jakarta Timur; SDN Grogol Selatan 09, Jakarta Selatan; SDN Ragunan 08 Pagi, Jakarta Selatan; dan SMAN 96 Jakarta, Jakarta Barat.

Anies mengatakan, Jakarta adalah sebuah kota yang terdiri dari kawasan daratan dan kepulauan. Karena itu, pembangunan di Jakarta haruslah pembangunan yang harus menjangkau semuanya.

Kendati belum ada pembangunan sekolah rendah emisi, Anies menyebut, Pemerintah Kota Jakarta Utara sudah merehabilitasi bangunan bertenaga panel surya yakni di Kantor Lurah Kebon Bawang, Rawa Badak Utara, Lagoa, dan Kantor Camat Koja.

Sesuai fungsinya, solar panel menjadi pembangkit listrik yang mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Sehingga, langkah rehabilitasi bangunan ini menjadi upaya Pemerintah Kota Jakarta Utara menghemat pemakaian listrik dari PLN karena sebagian listriknya dimanfaatkan dari sinar matahari.

"Rehab tersebut telah memasuki 40 persen pengerjaan. Proses rehab total empat bangunan tersebut direncanakan rampung sebelum akhir tahun 2022," kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Juaini dalam keterangannya di Jakarta Utara, Selasa.

Di Kepulauan Seribu sendiri juga saat ini sudah memiliki pembangkit listrik tenaga surya di pulau paling utara yaitu Pulau Sabira.

PLTS berkapasitas daya sebesar 400 kilo Watt peak (kWp) tersebut dapat menghasilkan energi listrik sebesar 1.200 kWh per hari atau dapat memenuhi 50 persen konsumsi listrik harian masyarakat pulau yang berpenduduk sekitar 600 jiwa itu. ● yan



FOTO:ANT

TARGET ANGKOT TERINTEGRASI JAKLINGKO

Seorang sopir angkutan kota Mikrotrans berada di dalam armadanya di Terminal Pulo Gadung, Jakarta, Selasa (4/10). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sebanyak 10.047 angkutan perkotaan (angkot) di Jakarta sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran antarmoda JakLingko pada tahun 2030.

PENGUMUMAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009 tentang piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, PT Dexter Eureka, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, pemegang NPWP No. 02.409.293.4-027.000, berkedudukan di Ruko mega Grosir Cempaka Mas Blok P No.6 J.L. Letjen Suprpto Jakarta Pusat 10640, No. telepon (021) 42886677, dengan ini mengumumkan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk tahun buku 2022 sebesar Rp. 629.003.102 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ribu Seratus Dua Rupiah), jumlah dimana telah dicatat sebagai kerugian dalam laporan keuangan perusahaan.

Jika ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tambahan atas penghapusan piutang dimaksud dapat menghubungi kami pada alamat tersebut di atas, yang dialamatkan kepada bagian Keuangan.

Jakarta, 5 Oktober 2022
Tertanda,
Direksi PT Dexter Eureka